

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LKIP)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANGGARAI**

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021, secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2021. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Sementara itu, capaian kinerja (performance results) merupakan realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2021 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2021. Penyampaian informasi kinerja ini, merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai kepada para stakeholders. Selanjutnya capaian kinerja yang belum memenuhi maupun yang telah memenuhi target sasaran akan dianalisis lebih lanjut dan bertujuan mengidentifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Informasi kinerja itu sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Namun demikian, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini tetap perlu mendapatkan masukan dari pembaca sekalian untuk mewujudkan kesempurnaan penulisan. Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai



SAHADOEN SILVESTER ZALDY, ST, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199903 1 053

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2016-2021	14
1. VISI	14
2. MISI	14
3. TUJUAN DAN SASARAN	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	24
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021	25
3.3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	25
3.3.2 Alokasi Anggaran Per Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai	27
BAB IV PENUTUP	28
Lampiran :	
1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
2. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021	
3. RENCANA AKSI TAHUN 2021	
4. MATRIKS RENSTRA 2016 – 2021	
5. LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implentasi SAKIP.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *Outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi selama ini. Namun anggaran yang cukup tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja, baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu, maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Dengan demikian anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja yakni anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan

masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir Tahun Anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah serta terpeiliharnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai adalah melaksanakan urusan/kewenangan pemerintahan dalam bidang perhubungan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian dan keselamatan lalu lintas, pelayaran dan pengawasan serta kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Pada pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian dan keselamatan lalu lintas, pelayaran dan pengawasan serta kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan dan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh dua orang Kepala Sub Bagian yang secara rinci menjalankan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yakni :

a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, bertugas menghimpun data dan pedoman serta menyusun perencanaan kegiatan, mengevaluasi serta menyiapkan laporan rutin bulanan, triwulan serta tahunan dan mengelola semua urusan keuangan yang meliputi administrasi keuangan penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas mengelola semua urusan ketatausahaan yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat serta urusan kepegawaian,

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Angkutan Jalan, Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan angkutan jalan, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan penertiban lalu lintas;
- c. Mengoordinasikan Perjanjian rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalandi Kabupaten Manggarai;
- d. Menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalandi Kabupaten Manggarai;
- e. Mengoordinasikan penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;
- f. Merencanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;

- g. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- h. Melakukan koordinasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- i. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Melakukan koordinasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- k. Melakukan koordinasi Perjanjian rencana umum jaringan trayek perkotaan
- l. Melakukan koordinasi Perjanjian rencana jaringan trayek perdesaan;
- m. Merumuskan Perjanjian tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan di Kabupaten Manggarai;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

1) Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang angkutan jalan;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang angkutan jalan;
- c. Melaksanakan pendataan jumlah angkutan darat sesuai trayek yang ada;
- d. Menyiapkan bahan Perjanjian tarif dasar angkutan;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin trayek;
- f. Membuat Perjanjian jaringan trayek serta komposisi angkutan;
- g. Melaksanakan pendataan pelayanan sesuai trayek yang ada;
- h. Melaksanakan penerbitan ijin isidentil;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penataan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Manggarai;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang angkutan jalan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang angkutan jalan; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang analisis dampak lalu lintas;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang analisis dampak lalu lintas;
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
- e. Menyusun rencana pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- f. Melakukan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten dalam kawasan perkotaan dan membuat rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten dalam kawasan perkotaan;

- g. Melaksanakan survey dan perhitungan load factor;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang analisis dampak lalu lintas;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisis dampak lalu lintas; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi pengendalian dan Penertiban Lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian dan penertiban lalu lintas;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penertiban lalu lintas;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran teknis dan laik jalan di terminal dan di jalan;
- f. Melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan pada jaringan jalan Kabupaten;
- g. Melaksanakan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- h. Melaksanakan pengendalian angkutan darat;
- i. Melaksanakan pengaturandan pengendalian lalu lintas bagi pejabat, tamu dan rombongan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan penertiban lalu lintas;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan penertiban lalu lintas; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas

Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang pengujian dan keselamatan lalu lintas;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pengujian dan keselamatan lalu lintas;
- c. Melaksanakan penelitian terhadap kecelakaan lalu lintas;
- d. Menyiapkan program penanganan daerah rawan kecelakaan;
- e. Melakukan bimbingan dan pengawasan teknis standar laik jalan sarana angkutan darat;
- f. Melakukan program peningkatan pelayanan pengujian angkutan;
- g. Merumuskan pedoman kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. Merumuskan pedoman kegiatan sarana dan prasarana lalu lintas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengujian dan keselamatan lalu lintas;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengujian dan keselamatan lalu lintas; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan registrasi kendaraan bermotor;
- d. Menyiapkan bahan standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- e. Menyiapkan rekomendasi penggunaan warna plat kendaraan;
- f. Melaporkan hasil pengujian kendaraan bermotor;
- g. Menerbitkan batas maksimum muatan kendaraan sesuai kelas jalan;
- h. Melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- i. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengujian kendaraan bermotor;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang sarana dan pra sarana lalu lintas;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana lalu lintas;
- c. Mengumpul data kegiatan perhubungan tentang jumlah, kondisi dan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas;
- d. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan/penghapusan terhadap kinerja sistem alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Melakukan pengontrolan, perbaikan/penghapusan, pemasangan perambuan, APILL dan sarana perlengkapan lalu lintas yang rusak;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana lalu lintas;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana lalu lintas; dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Melakukan analisis kinerja operasional standart batas maksimum muatan dan kecepatan kendaraan angkutan barang;
- d. Melakukan analisis tingkat pelayanan, penyiapan, penyusunan dan Perjanjian jaringan trayek angkutan perdesaan dan perkotaan baik rute, jumlah dan jenis kendaraan;
- e. Menentukan titik pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas;

- f. Melakukan pemantauan dan analisis dampak lalu lintas lingkungan;
- g. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan rancang bangun sarana angkutan jalan;
- h. Melakukan bimbingan keselamatan dan pengawasan tertib pemanfaatan jalan di Kabupaten Manggarai;
- i. Melakukan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan Kabupaten;
- j. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5. Bidang Pengawasan dan Pelayaran

Bidang Pengawasan dan Pelayaran mempunyai tugas merencanakan, mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengawasan, Sarana dan Prasarana Pelayaran, Penetapan Trayek dan Tarif Pelayaran. Bidang Pengawasan dan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

Menyusun rencana kerja bidang pengawasan dan pelayaran;

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan dan pelayaran;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pelayaran;
- c. Mengoordinasikan penerbitan perizinan bidang perhubungan darat, laut dan udara;
- d. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pelayaran;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pelayaran;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pelayaran; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

1) Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengawasan;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kapal yang beroperasi diwilayah perairan Kabupaten;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap tarif angkutan kapal yang beroperasi diwilayah perairan kabupaten;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap trayek kapal yang beroperasi diwilayah perairan kabupaten;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap muatan kapal yang beroperasi;
- g. Melaksanaan survey penerbitan perizinan bidang perhubungan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengawasan; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- c. Menyusun Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- d. Menyusun rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- e. Melaksanakan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- f. Melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- g. Melaksanakan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana pelayaran; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Penetapan Trayek dan Tarif Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Perjanjian trayek dan tarif pelayaran;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan trayek dan tarif pelayaran;
- c. Menyusun rencana lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal dalam daerah kabupaten;
- d. Menyusun rencana penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- f. Menyusun rancangan pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan dalam kabupaten;
- g. Melakukan koordinasi tata cara pelaksanaan pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan dalam kabupaten;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Perjanjian trayek dan tarif pelayaran;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Perjanjian trayek dan tarif pelayaran; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Perhubungan;

- b. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berdasarkan Struktur Organisasi, jabatan struktural berjumlah sebanyak 39 jabatan, dengan rincian :

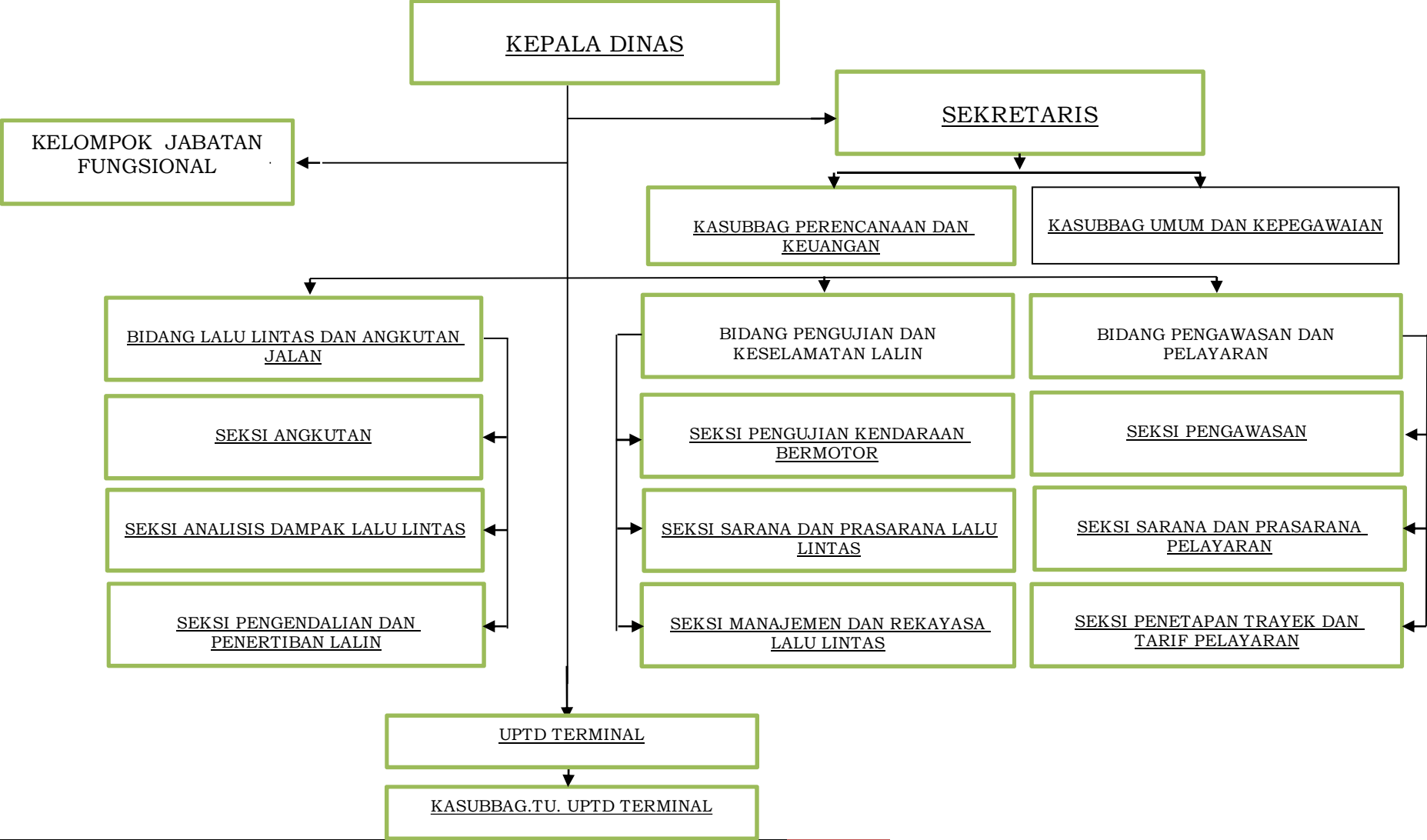
- Kepala Dinas Perhubungan : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 3 Orang
- Kepala Seksi : 9 Orang
- Kasubag : 2 Orang
- Kepala UPTD Terminal : 1 Orang

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, berjumlah 85 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas, Bidang Pengawasan dan Pelayaran dan UPTD Terminal adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah ASN sebanyak = 35 orang
- 2. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak = 50 orang
- 3. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan:
 - S1 : 10 orang
 - D-3 : 1 orang
 - SLTA : 23 orang
 - SLTP : 1 orang
- 4. Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan:
 - Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 13 orang
 - Golongan II : 19 orang
 - Golongan I : -
- 5. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan/eselonering:
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III-A : -
 - Eselon III-B : 1 orang
 - Eselon IV-A : 6 orang
 - Eselon IV-B : 1 orang
 - Staf Fungsional : 26 orang

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
(PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2016)



a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	Jabatan	Golongan																Tenaga Honorer/THL	Jumlah
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1	Kepala Dinas																1		1
2	Sekretaris																		0
2,1	Kasubag Umum dan Kepegawaian												1						1
2.1.1	Staf					1	1		1									4	7
2,2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan											1							1
2.2.1	Staf							1	3	1								2	7
3	Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan													1					1
3,1	Kepala Seksi Angkutan Jalan												1						1
3.1.1.	Staf																	1	1
3,2	Kepala Seksi Analisis Dampak Lalulintas																		0
3.2.1	Staf													1					1
3.3.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalin												1						1
3.3.1	Staf						2		2									31	35
4	Kepala Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalin																		0
4,1	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor											1							1
4.1.1	Staf							2	1				1					1	5
4,2	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalin																		0
4.2.1	Staf								1										1
4,3	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin												1						1
4.3.1	Staf																		0
5	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayaran																		0
5,1	Kepala Seksi Pengawasan											1							1
5.1.1	Staf																		0
5,2	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran												1						1
5.2.1	Staf																	1	1
5,3	Kepala Seksi Penetapan Trayek dan Tarif Pelayaran											1							1
5.3.1	Staf																		0
6	Kepala UPTD Terminal																		0
6,1	Kasubag TU. UPTD Terminal											1							1
6.1.1	Staf					1			3	1								10	15
Total		0	0	0	0	2	3	3	11	2	0	5	6	2	0	0	1	50	85

b. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.			Unit Kerja	Tingkat Pendidikan										Jumlah		
				Pegawai Negeri Sipil					Tenaga Honorer							
				SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3		S1	S2
1			Kepala Dinas						1							1
2			Sekertaris													
	a		Kasubag Umum dan Kepegawaian					1								1
		1	Staf			3					4					7
	b		Kasubag Perencanaan dan Keuangan					1								1
		1	Staf			4		1						2		7
3			Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					1								1
	a		Kepala Seksi Angkutan Jalan					1								1
		1	Staf								1					1
	b		Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas													
		1	Staf						1							1
	c		Kepala Seksi Pengendalian Dan Penertiban Lalin					1								1
		1	Staf			4				2	25			4		35
4			Kepala Bidang Pengujian Dan Keselamatan Lalu Lintas													
	a		Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor					1								1
		1	Staf			3		1					1			
	b		Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas													5
		1	Staf			1										1
	c		Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas			1										1
		1	Staf													
5			Kepala Bidang Pengawasan Dan Pelayaran													
	a		Kepala Seksi Pengawasan					1								1
		1	Staf													
	b		Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pelayaran				1									1
		1	Staf								1					1
	c		Kepala Seksi Penetapan Trayek Dan Tarif Pelayaran			1										1
		1	Staf													
6			Kepala UPTD Terminal													
		1	Staf													
	a		Kasubbag TU UPTD Terminal					1								1
		1	Staf			5					8		2			15
Total						22	1	10	2		2	39	1	8		85

E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
- E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. PERENCANAAN STRATEGIS 2016-2021
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2016-2021

1. VISI

**TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG TRANSPORTASI,
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI KABUPATEN**

2. MISI

1. Meningkatkan pelayanan prima yang tepat guna tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui operasi penertiban di lapangan

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai tahun 2021 yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Transportasi darat, laut, udara;
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
3. Meningkatkan pengelolaan perijinan, pembinaan dan pengawasan mitra.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021.

Disamping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Perjanjian IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, serta RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021 dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Tahun 2021

No	Sasaran		Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Transportasi	1.1.	Jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat di bidang transportasi
		1.2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		1.3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parker pada Kabupaten/Kota
		1.4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi darat dan laut	2.1	Presentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
		2.2	Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal
		2.3	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal
		2.4	Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan
		2.5	Jumlah arus penumpang angkutan umum
3.	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	3.1	% Angkutan darat
		3.2	Rasio Ijin Trayek
		3.3	Jumlah Uji Kir angkutan umum
		3.4	Pemasangan rambu

C. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Dinas Perhubungan bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
I	Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Transportasi	1.1	Jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat di bidang transportasi	30
		1.2	% Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	66
		1.3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parker pada Kabupaten/Kota	16

		1.4	% Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	40,45
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi darat dan laut	2.1	Presentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100
		2.2	Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal	1.752.020
		2.3	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal	32,745
		2.4	Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan	3.581
		2.5	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.601.245
		2.6	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan	142.133
		2.7	Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Lega	20.831
		2.8	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales Lega	70.018
3	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	3.1	% Angkutan darat	0,75
		3.2	Rasio Ijin Trayek	0,4
		3.3	Jumlah Uji Kir angkutan umum	4.000
		3.4	Pemasangan rambu	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.931.375.825	APBD – P
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.494.016.200	APBD – P dan APBN (DAK)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.221.100.000	APBD – P dan APBN (DAK)
TOTAL		7.646.492.025	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai adalah Perwujudan Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai telah mencanangkan beberapa target pencapaian kinerja. Dalam rangka pencapaian target kinerja dan sasaran-sasaran strategis telah diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran.

Untuk Menilai capaian kinerja sasaran strategis dapat dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

No.	Skala Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	≥ 100	MEMUASKAN
2	≥ 85 - 99	SANGAT BAIK
3.	≥ 70 - 84	BAIK
4.	≥ 50 - 69	CUKUP
5.	< 50	KURANG

Dinas Perhubungan telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Sasaran yang diperjanjikan sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran tersebut diukur dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja dimaksud pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi darat dan laut	1.1	Presentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	100	100
		1.2	Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal	1.752.020	719.655	41,07
		1.3	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal	32,745	20.259	61,85
		1.4	Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan	3.581	9.581	267,52
		1.5	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.601.245	252.606	9,72
		1.6	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan	142.133	382.901	269,40
		1.7	Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Lega	20.831	22.140	106,29
		1.8	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales Lega	70.018	102.219	145,99
RATA - RATA						124,02
			KATEGORI		MEMUASKAN	
2	Terwujudnya pengawasan dan	2.1	% Angkutan darat	0,75	1,2	160
		2.2	Rasio Ijin Trayek	0,4	0,1	25

	pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.3	Jumlah Uji Kir angkutan umum	4.000	0	0
		2.4	Pemasangan rambu	100	0	0
			RATA – RATA			46,25
			KATEGORI		KURANG	
Tingkat Capaian Sebesar						85,13
KATEGORI						CUKUP

Tabel 3.1. menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 85,13 % dengan kategori **SANGAT BAIK** dan capaian kinerja keuangan dari program-program strategis mencapai 90,38 %. Dari 3 (tiga) sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak dihitung, karena tidak adanya kegiatan dan anggaran sehingga presentase dari sasaran ini 0 % yakni sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Transportasi. Sedangkan 2 (dua) sasaran lainnya berkategori **KURANG** dan 1 (satu) sasaran berkategori **MEMUASKAN**.

Dalam rangka evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja yang telah tergambar pada tabel 3.1 di atas, maka capaian kinerja dimaksud diperbandingkan dengan target, realisasi dan capaian tahun 2020, Realisasi tahun 2021 akan disandingkan jugadengan target akhir masa RENSTRA Dinas Perhubungan

NO	Sasaran Strategis	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Sasaran 2 Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	2.221.100.000	2.156.428.950	97,09
2	Sasaran 3 Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	150.000.000	125.500.000	83,67
TOTAL		4.715.116.200	4.607.060.158	90,38

2021. Evaluasi dan analisisnya secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran 2
Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Presentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		100	40	40	100	100	100
	Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal		1.752.020	1.200.000	68,49	1.752.020	719.655	41,07
	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal		32.745	20.259	61.85	32.745	10.020	30,61
	Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan		3.621	16.262	449	3.581	9.581	267,52

	Jumlah arus penumpang angkutan umum		2.601.245	1.200.000	46,13	2.601.245	751.376	28,88
	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan		3.621	16.262	449	142.133	382.901	269,40
	Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Lega		20.831	18,320	87,95	20.831	22,140	106,29
	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales Lega		70.018	65.601	93,69	70.018	102.219	145,99
Rata-rata					162,02			123,72
Kategori		MEMUASKAN				MEMUASKAN		
Kode								

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 123,72% dengan kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rata – rata kinerja sasaaran sebesar 162,02% atau turun sebesar 38,3 %. Adapun uraian masing- masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Presentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Dengan target pada tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100 %.Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2020 sebesar 40 %,maka tahun 2021 ini mengalami peningkatan capaian sebesar 60 % dari realisasi capaian tahun sebelumnya.
2. Indikator Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal.Target capaian kinerja tahun 2021 sebesar 1,752,020 orang/penumpang dan terealisasi sebesar 719,655 orang/penumpang atau sebesar 41,07%. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi capaian tahun 2020 sebesar 1,752,020 orang/penumpang dengan realisasi sebesar 1,200,000 orang/penumpang atau 68,49 %, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan 27,42 % dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah orang/penumpang yang naik dan turun diterminal pada tahun 2021 sebagai akibat dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dampak dari merebaknya virus corona (covid 19).
3. Indikator Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal. Target capaian tahun 2021 sebesar 32,745 barang dengan realisasi sebesar 10.020 barang atau 30,61%, Jika dibandingkan dengan target 2020 sebesar 32.745 barang dengan realisasi sebesar 20.259 barang atau 61,85%, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 31,24%. Penurunan jumlah barang yang naik dan turun diterminal pada tahun 2021 sebagai akibat dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dampak dari merebaknya virus corona (covid 19).
4. Indikator Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan tahun 2021 dengan target 3.581 orang/penumpang dengan realisasi sebanyak 9581 orang/penumpang atau 267,52%. Dibandingkan tahun 2020, dengan target 3.621 orang/penumpang dan reaslisasi sebesar 16.262 orang/penumpang atau 449%, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 181,48%. Hal ini tidak terlepas juga dari akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dampak dari merebaknya virus corona (covid 19).
5. Indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2021 dengan target 2.601.245 orang/penumpang dan realisasi 751.376 atau 28,88 % sedangkan pada tahun 2020, Jumlah arus

penumpang angkutan umum dengan target 2.601.245 orang/penumpang dan realisasi 1.200.000 orang/penumpang atau 46,13 %, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 17,25 %. Hal ini juga sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dampak dari merebaknya virus corona (covid 19).

- Indikator Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan tahun 2021 dengan target 142.133 ton/barang, realisasi 382.901 ton/barang atau 269,40 %, jika di dibandingkan dengan tahun 2020, dengan target 3.621 ton/barang, realisasi sebesar 16.262 atau 449 %. capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 179,6%, ini terjadi karena terdapat perbedaan antara target barang pada tahun 2020 yang hanya 3.621 ton/barang sedangkan pada tahun 2021, barang yang ditargetkan bongkar muat di pelabuhan sebesar 382.901 ton/barang.
- Indikator Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Lega pada tahun 2021, dengan target 20.831 orang/penumpang, realisasi 22.140 orang/penumpang atau 106,29 %, dibandingkan dengan tahun 2020, dengan target 20,831 orang/penumpang, realisasi 18,320 orang/penumpang atau 87,95 %, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,34 %.
- Indikator Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales Lega tahun 2021 dengan target 70.018 barang, realisasi sebanyak 102,219 atau 145,99 %, dibandingkan dengan tahun 2020, dengan target 70.018 barang, realisasi 65.601 barang atau 93,69 %, maka capaian tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 52,3 %.

Tabel 3.3
 Capaian Sasaran 3
 Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	% Angkutan darat		0,55	1,38	138	0,75	1,2	160
	Rasio Ijin Trayek		50,07	45,5	45,5	0,4	0,1	25
	Jumlah Uji Kir angkutan umum		3500	1306	37,31	4.000	0	0
	Pemasangan rambu		100	0	0	100	0	0
Rata-rata					55,20			46,25
Kategori			CUKUP			KURANG		
Kode								

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 46,25% dengan kategori KURANG. Capaian kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rata – rata kinerja sasaaran sebesar 55,20 % atau turun sebesar 8,95 %. Adapun uraian masing- masing indikator sebagai berikut :

- Indikator % Angkutan darat tahun 2021 dengan target 0,75 %, realisasi sebesar 1,2 % atau 160 %, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan target 0,55%, realisasi 1,38 % atau 138 %. Maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 22 %.

- Indikator Rasio Ijin Trayek tahun 2021 dengan target 0,4 %, realisasi sebesar 0,1 % atau 25 %, dibandingkan dengan tahun 2020, dengan target 50,07 %, realisasi 45,5 % atau 45,5 %. Maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,5%.
- Indikator Jumlah Uji Kir angkutan umum tahun 2021 dengan target 4.000 angkutan umum, realisasi 0 angkutan umum, sedangkan tahun 2020, dengan target 3500 angkutan umum, realisasi 1306 atau 37,31%, Maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh tidak beroperasinya bidang pengujian pada tahun 2021 akibat belum memiliki akreditasi bidang pengujian.
- Indikator pemasangan rambu tahun 2021, dengan target 100 rambu, realisasi 0 atau 0%, sedangkan tahun 2020, dengan target 100 rambu, realisasi 0 atau 0%.

3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian kinerja seperti yang telah diuraikan di atas, disamping karena didukung berbagai program strategis juga didukung dengan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur ASN.

Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai berjumlah 85 orang, yang terdiri dari PNS berjumlah 35 orang (41,18%) dan Honorer 50 orang (58,82%). Adapun komposisi ASN Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. **Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah	%
1.	SD	0	0	0	0
2.	SMP /Sederajat	0	2	2	2,35
3.	SMA/Sederajat	22	39	61	71,76
4.	Diploma III/Akta III	1	1	2	2,35
5.	S-1/ Akta IV	10	8	18	21,18
6.	S-2	2	0	2	2,35
7.	S-3	0	0	0	0,00
JUMLAH		35	50	85	100

Komposisi Pegawai (PNS) Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tahun 2021 menurut Pendidikan, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sebesar 71,76%

b. **Jumlah PNS menurut Golongan sebagai berikut:**

GOLONGAN		RUANG					
		A	B	C	D	JUMLAH	%
1	I	-	-	-	-	0	0,00
2	II	2	3	3	11	19	54,29
3	III	2	-	5	6	13	37,14
4	IV	2	-	-	1	3	8,57
JUMLAH						35	100

Komposisi Pegawai (PNS) Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tahun 2021 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan II sebesar 54,29%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.646.492.025,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30 Realisasi APDB
Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasi	5.493.990.525	5.103.448.767	92,89
	<i>Belanja Pegawai</i>	2.493.311.775	2.281534.864-	91,51
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.678.750	2.821.913.903,-	94,04
2.	Belanja Modal	2.152.501.500	2.152.480.350	99,99
	<i>Belanja Modal peralatan dan Mesin</i>	32.501.500	32.501.400	100
	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	2.120.000.000	2.119.978.950	99,99
TOTAL		7.646.492.025	7.255.929.117	94,89

3.3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	2.221.100.000	2.156.428.950	97,09
2	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	150.000.000	25.500.000	83,67
TOTAL		2.371.100.000	2.281.928.950	90,38

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **85,13 %** maka realisasi anggaran sebesar **90,38 %** menunjukkan kurang efisiensinya penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Tabel 3.3.2
Tingkat Efektivitas Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	KET.
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	124,02	97,09	Efisien
2	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	46,25	83,67	Tidak Efisien
TOTAL		85,13	90,38	Tidak Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.3.2 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **85,13 %** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar **90,38 %**, menunjukkan tidak efisiennya penggunaan anggaran.

Selain realisasi anggaran pada program-program strategis tersebut, juga terdapat beberapa program-program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3.3
Realisasi Anggaran Program Pendukung
Tahun 2021

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, aset, keuangan dan dokumen penting lainnya	2.931.375.825	2.648.868.959	90,36
Jumlah Anggaran Program Pendukung		2.931.375.825	2.648.868.959	90,36
Jumlah Anggaran Program Strategis		2.371.100.000	2.281.928.950	96,23
Total Anggaran Belanja Langsung (Anggaran Program Strategis + Anggaran Program Pendukung)		7.646.492.025	7.225.929.117	94,49
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				85,13
% Tingkat Efektivitas				-9,36

Sesuai tabel 3.33 tersebut di atas, realisasi pengelolaan anggaran belanja langsung sebesar **94,49 %** jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar **85,13 %** menunjukkan tidak efektifnya pencapaian sasaran dan tidak efisiensidalam penggunaan anggaran.

3.3.2 Alokasi Anggaran Per Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.646.492.025,-** Dengan rincian **Belanja Operasi** sebesar **Rp 5.493.990.525** sedangkan realisasi **Belanja Operasi** yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp **5.103.448.767,-**atau sama dengan **92,89%**. Sedangkan **Belanja Modal** Rp **2.152.501.500,-** dengan realisasi dana **Belanja Modal** yang digunakan untuk membiayai program kegiatan adalah sebesar Rp **2.152.480.350** atau sama dengan **99 %**.

Realisasi anggaran tahun 2021 Berdasarkan uraian belanja operasi dan belanja modal secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
 TA. 2021Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Mangarai

No.	Nama Bidang	Belanja Operasi			Belanja Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	810.900.000	810.600.000	99,96			
2	Bidang Pengujian Dan Keselamatan Lalin	150.000.000	125.500.000	83,67			
3	Bidang Pengawasan dan Pelayaran	95.300.000	32.900.000	34,52	2.120.000.000	2.119.978.950	99,99
4	Sekretariat	2.951.424.325	2.666.567.559	90,35	32.501.500	32.501.400	100
5	UPTD Terminal	1.486.366.200	1.467.881.208	98,76			
Jumlah		5.493.990.525	5.103.448.767	92,90	2.152.501.500	2.152.480.350	99,99

BAB IV PENUTUP

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 telah melaksanakan salah kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pada dasarnya secara keseluruhan capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya kendala / hambatan dan masalah baik internal maupun eksternal, akan tetapi hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga diharap sasaran dan target capaian setiap indikator kinerja dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pengukuran dari 2 (dua) sasaran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja adalah **85,13 %**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian lebih 100%, namun demikian masih terdapat 2 (dua) sasaran yang tingkat keberhasilannya lebih rendah dari 100% yaitu:

1. Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi darat dan laut **124,02%**
2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan **46,25%**

Capaian dua Sasaran ini belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Los Pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi syarat.
2. Kesadaran para pengemudi dan pengusaha angkutan masih sangat rendah untuk menggunakan jaringan trayek yang sudah diberikan sehingga sering terjadi pelanggaran;

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan kinerja guna mendukung pencapaian sasaran yaitu:

1. Diusulkan untuk pembangunan Los Pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi syarat.
2. Setiap saat diadakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan dan awak/pengemudi kendaraan agar benar-benar mematuhi aturan lalu lintas dan izin trayek yang diberikan;
3. Pengawasan dan pengendalian terus dilakukan melalui pola pengawasan langsung ke lapangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pengusaha-pengusaha jasa angkutan terkait dengan kegiatan perencanaan, evaluasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan bidang transportase angkutan jalan;

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengadakan sosialisasi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha angkutan dan awak/pengemudi kendaraan agar benar-benar mematuhi aturan lalu lintas dan izin trayek yang diberikan;
- Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta mengajukan Proposal dan mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Dalam keterbatasan sumber daya aparatur, alokasi anggaran, peralatan dan perlengkapan kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, maka segala keberhasilan yang dicapai merupakan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan atas beberapa program dan kegiatan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan telah memperlihatkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Ada 3 (tiga) sasaran dengan rata-rata capaian **85,13 %** dimana terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dihitung yang disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan kegiatan pada indikator tersebut. Pencapaian ini mengalami penurunan sebesar **8,11%** dari tahun 2020 yakni **93,24%** dengan kategori yang sama yaitu **Sangat Baik**. Uraian terinci atas ketiga sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Capaian Sasaran Tahun 2020 dan 2021

No.	Sasaran	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi	Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	162,02	MEMUASKAN	123,72	MEMUASKAN
2	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	55,20	CUKUP	46,25	KURANG
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN 3 SASARAN		93,24		85,13	
PREDIKAT		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	

Tabel 4.1 di atas menegaskan bahwa pada tahun 2021 :

- Kinerja **MEMUASKAN** mencakup 1 (Satu) sasaran atau **123,72 %** yaitu:
 - Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut
- Kinerja **KURANG** mencakup 1 (Satu) sasaran atau 46,25 % yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Transportasi dan Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritikan yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK di hari esok sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekedar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat MEMUASKAN, tetapi terutama untuk mewujudkan **MANGGARAI YANG MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING.**

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai



SAHADOEN SILVESTER ZALDY,ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199903 1 053

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Wae Ces Kelurahan Karot Telp. 21218 Ruteng

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Sahadoen Silvester Zaldy, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA

N a m a : Herybertus Geradus Laju Nabit, SE, MA
Jabatan : Bupati Manggarai

Selaku atasan Pihak PERTAMA,

selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Pihak PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANGGARAI,



SAHADOEN SILVESTER ZALDY, ST, MT
NIP. 19671231 199903 1 053

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, aset, keuangan dan dokumen penting lainnya	.1.1.1 Jumlah dokumen kepegawaian yang terdata dengan baik	118
		.1.1.2 Jumlah dokumen, perencanaan aset	13
		.1.1.3 Jumlah laporan keuangan	1
		.1.1.4 Jumlah dokumen hasil akuisisi	1
		.1.1.5 % PAD DISHUB	100
2	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	.1.2.1 Jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat di bidang transportasi	30
		.1.2.2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	66
		.1.2.3 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parker pada Kabupaten/Kota	16
		.1.2.4 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	40,45
		.1.2.5 % kendaraan bermotor laik jalan	4000
		.1.2.6 Menurunnya tingkat pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan	25
		.1.2.7 Rasio kendaraan wajib uji	100
3	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi darat dan laut	.1.3.1 % Fasilitas Perlengkapan Jalan	100
		.1.3.2 Rasio panjang jalan (1.661,346 km) dengan kendaraan	0,85
		.1.3.3 % angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	60%
		.1.3.4 Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal	1.752.020
		.1.3.5 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal	32.745
		.1.3.6 Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan	3.581
		.1.3.7 Jumlah arus penumpang angkutan umum	2601245
		.1.3.8 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan	3.581
		.1.3.9 Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Leea	20.831
		.1.3.1 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales	70.018
4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	.1.4.1 % Angkutan darat	0,75
		.1.4.2 % kendaraan Izin angkutan umum dan barang	100
		.1.4.3 Rasio Ijin Trayek	0,5

Ruteng, 23 November 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI,



SAHADOEN SILVESTER ZALDY, ST, MT

NID. 106712211000021052

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
MANGGARAITAHUN 2016 - 2021

VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang
Transportasi yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Manggarai

NO	MISI	TUJUAN		TARGET 2015	SASARAN		SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR	STRATEGI PENCAPAIAN			Penanggungjawab	
		URAIAN	INDIKATOR		URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021		Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Meningkatkan pelayanan prima yang tepat guna tepatwaktu dan tepat sasaran	1.1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	1.1.1 Jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat dibidang transportasi	30	1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima bidang transportasi	1.1.1.1 Jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat di bidang transportasi	Orang	8	10	15	20	25	30	30	Mengrim aparatur mengikuti pendidikan dan latihan teknis	Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang Transportase	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bidang Sekretariat
					66		1.1.1.2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang pengujian kendaraanbermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	66	66,66	66	40	66	66	66	Mengrim aparatur mengikuti pendidikan dan latihan teknis	Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang Transportase	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas
					16		1.1.1.3 Tersedianya Sumber Daya Manusia(SDM) di bidang MRLI, Evaluasi Andalin,Pengelolaan parker pada Kabupaten/Kota	%	40	40	40	40	16	16	16	Mengrim aparatur mengikuti pendidikan dan latihan teknis	Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang Transportase	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					40,45		1.1.1.4 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	98,11	76,25	53,33	40	40,45	40,45	40,45	Mengrim aparatur mengikuti pendidikan dan latihan teknis	Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang Transportase	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas
2	Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai;	1.2	Meningkatkan Akses Transportasi dan Logistik	1.1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana Transportasi dan Logistik Perhubungan Darat,Laut dan Udara	100	1.1.2 Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana transportasi	1.1.2.1 Prosentase terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Membangun dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Peningkatan manajemen pengelolaan	1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a Pembanguna gedung Terminal	UPTD Terminal
					1.626.573		1.1.2.2 Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal	Orang	1.626.573	1.650.971	1.683.989	1.717.668	1.752.020	1.752.020	1.752.020				UPTD Terminal
					30.255		1.1.2.3 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal	Ton	30.255	30.859	31.475	32.104	32.745	32.745	32.745			b Pemeliharaan Saranadan Prasarana Perhubungan	UPTD Terminal
					3349		1.1.2.4 Jumlah penumpang yang naik dan turun dipelabuhan	Orang	3349	3.415	3.482	3.551	3.621	3.621	3.581	Koordinasi dengan instansi terkait		2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Pengawasan dan Pelayaran
					2,203,437		1.1.2.5 Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	2,203,437	2,302,889	2,402,341	2,501,793	2,601,245	2,601,245	2,601,245			1 Pengembangan saranadan prasarana peyananan jasa angkutan	UPTD Terminal
					131314		1.1.2.6 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di dipelabuhan	Ton	131314	133.939	136.616	139.347	142.133	142.133	142.133	Koordinasi dengan instansi terkait		2 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Pengawasan dan Pelayaran
					19.248		1.1.2.7 Jumlah penumpang yang naik dan turun di Bandara Frans Sales Lega	Orang	19.248	19.632	20.024	20.424	20.831	20.831	20.831	Koordinasi dengan instansi terkait			Bidang Pengawasan dan Pelayaran
					64.690		1.1.2.8 Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di Bandara Frans Sales Lega	Ton	64.690	65.983	67.301	68.646	70.018	70.018	70.018	Koordinasi dengan instansi terkait			Bidang Pengawasan dan Pelayaran

NO	MISI	TUJUAN		TARGET 2015	SASARAN		SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR	STRATEGI PENCAPAIAN			Penanggungjawab
		URAIAN	INDIKATOR		URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021		Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui operasi penertiban di lapangan;	1.3 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	1.1.3 Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	46	1.1.3 Terwujudannya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	1.1.3.1 Angkutan darat	%	0,5	0,55	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mitra	Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
				0.00225		1.1.3.2 Rasio Ijin Trayek	%	0,00269	0,00313	0,00357	0,00401	0,00445	0,00445	0,00445	Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum	Koordinasi dengan instansi terkait	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
				2.151		1.1.3.3 Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	2.300	2.750	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Peningkatan manajemen pengelolaan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas
				53,52		1.1.3.4 Pemasangan Rambu-rambu	%	66.88	73:29:00	79.97	93:32:00	100	100	100	Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Pengadaan Rambu-rambu lalulintas angkutan jalan	2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalulintas angkutan jalan	Bidang Pengujian dan Keselamatan Lalu Lintas

Ruteng, 09 Januari 2021
PLT. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KABUPATEN
MANGGARAI,
TTD
DRS. LAMBERTUS SAHE
Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992031210



LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD KAB. MANGGARAI

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Keadaan: Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI		
		Pegawai				Barang dan Jasa				Modal							
		Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi						
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik				
			Rp	%			%	Rp			%	%			Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
2.15.01.2.02.5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS / Uang Representatif	1.694.230.799	1.519.255.080	89,67	89,67									1.694.230.799	1.519.255.080	89,67	89,67
2.15.01.2.02.5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga	178.576.488	166.845.796	93,43	93,43									178.576.488	166.845.796	93,43	93,43
2.15.01.2.02.5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan	114.472.375	107.435.000	93,85	93,85									114.472.375	107.435.000	93,85	93,85
2.15.01.2.02.5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum	47.900.000	53.820.000	112,36	112,36									47.900.000	53.820.000	112,36	112,36
2.15.01.2.02.5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras	115.354.740	108.485.160	94,04	94,04									115.354.740	108.485.160	94,04	94,04
2.15.01.2.02.5.1.01.01.07.0001	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.970.400	2.485.200	50,00	50,00									4.970.400	2.485.200	50,00	50,00
2.15.01.2.02.5.1.01.01.09.0001	Iuran Jaminan Kesehatan	62.552.820	63.591.200	101,66	101,66									62.552.820	63.591.200	101,66	101,66
2.15.01.2.02.5.1.01.01.10.0001	Iuran Jaminan Kecelakaan	4.589.435	3.123.760	68,06	68,06									4.589.435	3.123.760	68,06	68,06
2.15.01.2.02.5.1.01.01.11.0001	Iuran Jaminan Kematian	14.056.732	9.389.947	66,80	66,80									14.056.732	9.389.947	66,80	66,80
2.15.01.2.02.5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji	26.375	25.721	97,52	97,52									26.375	25.721	97,52	97,52
2.15.01.2.02.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000	198.200.000	98,61	98,61									201.000.000	198.200.000	98,61	98,61
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18.131.611	13.678.000	75,44	75,44									18.131.611	13.678.000	75,44	75,44
	Jumlah Tidak Langsung	2.455.861.775	2.246.334.864	91,47	91,47									2.455.861.775	2.246.334.864	91,47	91,47
BELANJA LANGSUNG																	
2. 15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :																
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
2.15.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					360.000	360.000	100,00	100,00					360.000	360.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					340.000	340.000	100,00	100,00					340.000	340.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					300.000	300.000	100,00	100,00					300.000	300.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.800.000	40.800.000	100,00	100,00					40.800.000	40.800.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2.15.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					260.000	260.000	100,00	100,00					260.000	260.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					340.000	340.000	100,00	100,00					340.000	340.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					300.000	300.000	100,00	100,00					300.000	300.000	100,00	100,00
2.15.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					1.200.000	1.200.000	100,00	100,00					1.200.000	1.200.000	100,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI		
		Pegawai				Barang dan Jasa				Modal							
		Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi						
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik				
			Rp	%			%	Rp			%	%			Rp	%	%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
2.15.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawabn Pengelola Keuangan	23.400.000	23.400.000	100,00	100,00			0,00	0,00					23.400.000	23.400.000	100,00	100,00
2.15.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00									3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
2.15.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0004	HonorariumTim Pelaksana Kegiatan dan Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.200.000	4.200.000	100,00	100,00					4.200.000	4.200.000	100,00	100,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
2.15.01.2.05.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa																
2.15.01.2.05.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor																
2.15.01.2.05.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak																
2.15.01.2.05.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya																
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
2.15.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					5.450.000	2.750.000	50,46	50,46					5.450.000	2.750.000	50,46	50,46
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
2.15.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					24.882.000	24.855.000	99,89	99,89					24.882.000	24.855.000	99,89	99,89
2.15.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					31.005.000	31.003.500	100,00	100,00					31.005.000	31.003.500	100,00	100,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
2.15.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					45.580.000	44.336.000	97,27	97,27					45.580.000	44.336.000	97,27	97,27
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
2.15.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.486.300	12.426.900	99,52	99,52					12.486.300	12.426.900	99,52	99,52
2.15.01.2.06.06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
2.15.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah																
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material																
2.15.01.2.06.07.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.139.000	2.759.000	87,89	87,89					3.139.000	2.759.000	87,89	87,89
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD																
2.15.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					85.200.000	66.933.364	78,56	78,56					85.200.000	66.933.364	78,56	78,56
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.15.01.2.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat																
2.15.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0				1.110.000	1.110.000	100,00	100,00					1.110.000	1.110.000	100,00	100,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
2.15.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telpn					1.500.000	0	0,00	0,00					1.500.000	0	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI		
		Pegawai				Barang dan Jasa				Modal							
		Jlh Dana (Rp)	Realisasi		Fisik	Jlh Dana (Rp)	Realisasi		Fisik	Jlh Dana (Rp)	Realisasi		Fisik				
			Keuangan	%			Keuangan	%			Keuangan	%					
			Rp	%	%		Rp	%	%		Rp	%	%		Rp	%	%
2.15.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					16.000.000	15.982.500	99,89	99,89					16.000.000	15.982.500	99,89	99,89
2.15.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagiham Listrik					8.200.000	4.785.000	58,35	58,35					8.200.000	4.785.000	58,35	58,35
2.15.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan					9.350.000	7.482.500	80,03	80,03					9.350.000	7.482.500	80,03	80,03
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
2.15.01.2.08.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00									1.750.000	1.750.000	100,00	100,00
2.15.01.2.08.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer									27.181.500	27.181.400	100,00	100,00	27.181.500	27.181.400	100,00	100,00
2.15.01.2.08.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya									5.320.000	5.320.000	100,00	100,00	5.320.000	5.320.000	100,00	100,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah																
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
2.15.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					47.110.250	33.037.776	70,13	70,13					47.110.250	33.037.776	70,13	70,13
2.15.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					46.100.000	19.130.000	41,50	41,50					46.100.000	19.130.000	41,50	41,50
2.15.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					15.900.000	13.741.155	86,42	86,42					15.900.000	13.741.155	86,42	86,42
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
2.15.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					2.500.000	2.200.000	88,00	88,00					2.500.000	2.200.000	88,00	88,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
2.15.01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00									1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
2.15.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					10.000.000	10.000.000	100,00	100,00					10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Jumlah 1	29.400.000	29.400.000	100,00	100,00	413.612.550	340.632.695	82,36	82,36	32.501.500	32.501.400	100,00	100,00	475.514.050	402.534.095	84,65	84,65
2.15.02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C																
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)																
2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0				1.426.050.000	1.426.050.000	100,00	100,00					1.426.050.000	1.426.050.000	100,00	100,00
2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					48.642.000	36.967.008	76,00	76,00					48.642.000	36.967.008	76,00	76,00
2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.918.400	1.216.050	41,67	41,67					2.918.400	1.216.050	41,67	41,67
2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					8.755.800	3.648.150	41,67	41,67					8.755.800	3.648.150	41,67	41,67
2.15.02.2.04	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota																
2.15.02.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					91.900.000	91.900.000	100,00	100,00					91.900.000	91.900.000	100,00	100,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
5.1.01.2.15.02.2.05.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan																
2.15.02.2.05.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa																

[illegible]

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI			
		Pegawai				Barang dan Jasa				Modal								
		Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi			Jlh Dana (Rp)	Realisasi							
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik					
			Rp	%			%	Rp			%	%			Rp	%	%	
2.15.03.2.02	Penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
2.15.03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.350.000	5.900.000	92,91	92,91					6.350.000	5.900.000	92,91	92,91	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																	
2.15.03.2.13.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000	600.000	100,00	100,00									600.000	600.000	100,00	100,00	
2.15.03.2.13.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.200.000	2.950.000	56,73	56,73	0								5.200.000	2.950.000	56,73	56,73	
2.15.03.2.13.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0								0	0		0,00	
2.15.03.2.13.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.000.000	27.000.000	67,50	67,50					40.000.000	27.000.000	67,50	67,50	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.500.000	0							3.500.000	0	0,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.600.000	0							9.600.000	0	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					30.000.000	0							30.000.000	0	0,00	0,00	
						5.850.000	0							5.850.000	0	0,00	0,00	
2.15.03.2.13.02.5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara																	
	Pembangunan Tambat Labuh di Kali Reo Kelurahan Baru Kecamatan Reok									2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100,00	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100,00	
	Perencanaan									70.000.000	69.990.000	99,99	99,99	70.000.000	69.990.000	99,99	99,99	
	Pengawasan									50.000.000	49.988.950	99,98	99,98	50.000.000	49.988.950	99,98	99,98	
	Jumlah 3	5.800.000	3.550.000	61,21	61,21	95.300.000	32.900.000	34,52	34,52	2.120.000.000	2.119.978.950	100,00	100,00	2.221.100.000	2.156.428.950	97,09	97,09	
	Jumlah Belanja Langsung	37.450.000	35.200.000	93,99	93,99	3.000.678.750	2.821.913.903	94,04	94,04	2.152.501.500	2.152.480.350	100,00	100,00	5.190.630.250	5.009.594.253	96,51	96,51	
	Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung	2.493.311.775	2.281.534.864	91,51	91,51	3.000.678.750	2.821.913.903	94,04	94,04	2.152.501.500	2.152.480.350	100,00	100,00	7.646.492.025	7.255.929.117	94,89	94,89	

Ruteng, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai



SAHADOEN SILVESTER ZALDY, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199903 1 053